



Media: Tribun Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 26 September 2020

Halaman: 9

ASN Meninggal Terkait Dengan Klaster Besar
● DPRD Desak Deteksi Sumber Penularan di DIY

YOGYA, TRIBUN - Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembajun Setyaningastutie mengatakan bahwa ASN Bapel Jamkesos DIY yang meninggal karena Covid-19, terkait dengan klaster besar. Namun Pembajun tidak menjelaskan lebih lanjut tentang klaster besar tersebut.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih, memberikan keterangan bahwa setelah pihaknya melakukan tracing pada ASN tersebut, hasilnya ia diketahui memiliki riwayat melakukan perjalanan dengan saudaranya yang setelah perjalanan tersebut melakukan tes swab dan mendapatkan hasil positif.

"Kemudian karena saudaranya positif, maka ASN tersebut berinisiatif untuk melakukan swab secara mandiri dan melaporkan pada atasannya. Hasil pelacakan kita juga mendapatkan informasi bahwa saudara dari ASN tersebut adalah karyawan dari institusi keuangan di Yogya," ungkapnya, Jumat (25/9).

Berty mengatakan pihaknya sedang melaksanakan tracing kasus klaster sebuah institusi keuangan dan ada kemungkinan terkait dengan kasus positif ASN tersebut.

"Keterkaitan ini karena perilaku sebagai pelaku perjalanan yang tidak disiplin pada protokol kesehatan, sehingga keterpaparan dapat terjadi," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembajun Setyaningastutie mengatakan bahwa 8 September 2020, BN (inisial ASN tersebut) terakhir kali masuk ke kantor. Hal tersebut lantaran yang bersangkutan melakukan pemeriksaan mandiri dan menunggu hasil swab. Selanjutnya, setelah diketahui hasil positif, maka pihaknya bergerak untuk melakukan tracing kepada keluarga dan rekan kerjanya.

"Memang ada 4 orang anggota atau 4 orang pekerja, 3 ASN dan 1 naban yang kemudian tertular transmisi beliau. Ada 4 orang, 3 ASN dan 1 naban," bebernya.

Pembajun pun menggaris bawahi bahwa kalimat penutupan kantor itu sebenarnya bukan kantor secara keseluruhan yang melainkan pelayanan unit kerja. Ia pun menegaskan penutupan yang dimaksud tidak seperti yang dipikirkan masyarakat, tapi penutupan tersebut dilakukan dengan maksud untuk ada pengetatan protokol kesehatan oleh aparat. Sudah ada payung hukum Inpres dan Pergub. Kita juga minta bantuan TNI-Polri di DIY untuk melakukan penegakan protokol kesehatan di berbagai lokasi keramaian. Mall, toko, perkantoran bisa dikasih sanksi kalau abai," ungkapnya.

Huda menambahkan, bahwa satu-satunya cara yang paling ampuh yakni ada pada kesadaran individu. Ia meminta warga secara personal merasa dirinya positif Covid-19 sehingga bisa menjaga satu dengan lain dan menegakkan protokol kesehatan dengan baik.

penyempitan disinfektan. "Kami sudah menemukan hasil yang luar biasa karena ini klaster besar menurut kami. Pelayanan tidak ditutup tetap dilaksanakan," ucap Pembajun.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudianta, mengatakan, saat ini penting untuk mendeteksi klaster yang tersebar di DIY mengingat penularan Covid-19 di DIY semakin masif. Namun hal tersebut bukan hal yang mudah.

"Termasuk yang terkait ASN, itu masih dugaan. Ini dapat dari mana, memiliari siapa, transmisi lokal terjadi sangat masif," ucapnya.

Sistem sosial

Politisi PKS tersebut merasa perlu mengaktifkan kembali sistem sosial seperti di awal pandemi. Saat itu masyarakat di kampung maupun desa melakukan upaya pengetatan pengawasan untuk masuk ke wilayah serta melarang kegiatan bertamu, terutama untuk mereka yang berasal dari luar daerah.

"Kalau di tempat umum

"Saya prihatin sekali saat mampir ke rumah sakit, melihat teman-teman tenaga kesehatan merasa sangat berat. Kasihan sekali. Jangan sampai rumah sakit kita ambruk. Saya pribadi mengucapkan bela sungkawa kepada rekan kita ASN Bapel Jamkesos DIY. Semoga beliau diterima arwahnyanya di sisi-Nya dan husnul khatimah," tutupnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita
1.	☐ Negatif
2.	☐ Positif
3.	☐ Netral
4.	
5.	

☐ Untuk Ditanggapi
☐ Untuk Diketahui
☐ Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005